

Public Participation in Development in Banjarbendo Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Renanda Ayu Pramesti Cahyani¹⁾, Hendra Sukmana^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. *Village development is an effort to improve the quality of human resources and society as a whole based on potential and capacity by supporting the realization of a society that can be prosperous, independent, advanced, just and independent. Therefore, the Banjarbendo Village community needs to be involved in development due to the fact that the Banjarbendo Village community's involvement regarding presence has not taken place as a whole. This study aims to determine and analyze Community Participation in Development in Banjarbendo Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques used are interviews, observation and literature studies. Technical informants include the Head of Banjarbendo Village, Head of Services, Head of Planning and Community Leaders. The results of this study are seen from community participation in the development of Banjarbendo Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency with 4 indicators of community participation, namely participation in decision making that attendance during the day is not optimal, giving ideas that are approved with a priority scale where the results are 10 types of proposed development and feedback always occurs during meetings. Participation in the implementation with the result that the implementation of development is physically and the development of human resources is constrained by the lack of enthusiasm of the community, as well as the community in providing labor contributions, then funds have been obtained from APBDesa, and materials are not provided by the community which provides more consumption. Community participation in taking benefits shows that development has not been carried out due to limited human resources, funds and implementation time, then low community participation in the use of facilities due to lack of awareness and lack of funds. Participation in the evaluation that the people of Banjarbendo Village always submit evaluations in the form of criticism.*

Keywords – public participation; village development

Abstrak. *Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan potensi dan kapasitas dengan mendukung perwujudan pada arah masyarakat yang dapat sejahtera, mandiri, maju, adil dan mandiri. Oleh karena itu, masyarakat Desa Banjarbendo perlu terlibat dalam pembangunan dikarenakan fakta yang terjadi bahwa keterlibatan masyarakat Desa Banjarbendo mengenai kehadiran belum secara keseluruhan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi dan studi literatur. Teknik informan diantaranya adalah Kepala Desa Banjarbendo, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan 4 indikator partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan bahwa kehadiran pada waktu siang hari mengalami ketidakefektifan, pemberian ide yang disetujui dengan skala prioritas dimana hasilnya terdapat 10 jenis pembangunan yang diusulkan dan pemberian tanggapan selalu terjadi ketika rapat. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan hasil bahwa pelaksanaan pembangunan ada yang secara fisik dan pembangunan sumber daya manusia terkendala kurang antusiasnya masyarakat, serta masyarakat dalam pemberian sumbangan tenaga, kemudian untuk pemberian dana sudah diperoleh dari APBDesa, dan bahan material tidak diberikan masyarakat yang lebih memberikan konsumsi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat diperoleh bahwa pembangunan belum terlaksana akibat keterbatasan sumber daya manusia, dana dan waktu pelaksanaan, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas akibat kurangnya kesadaran dan tidak adanya dana. Partisipasi dalam evaluasi bahwa masyarakat Desa Banjarbendo selalu menyampaikan evaluasi berupa kritikan.*

Kata Kunci – partisipasi masyarakat; pembangunan desa

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk dapat menjalankan pembangunan yang tidak melupakan adanya kerja sama dalam pelaku pembangunan, dapat mempergunakan sumber daya dengan tepat sasaran serta dikatakan pula bahwa pembangunan nasional juga perlu melakukan pengoptimalan partisipasi masyarakat. Dengan adanya tujuan tersebut, pembangunan nasional memerlukan adanya perwujudan masyarakat secara adil dan makmur dapat dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menekankan pembangunan nasional yang mengedepankan segala unsur sebagai tolak ukur kemajuan bangsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan kemampuan nasional dimata negara lainnya.

Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil apabila dapat dilaksanakan secara merata dikarenakan hal ini merupakan cita-cita bagi negara Indonesia untuk mencapai adanya kualitas hidup yang baik, karena pembangunan nasional yang tidak berjalan dengan baik maka akan membuat kualitas masyarakat buruk, bahwa pembangunan nasional dapat diartikan sebagai suatu upaya terkordinasi dalam penciptaan alternatif yang lebih banyak kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya [12]. Pembangunan nasional dikatakan dapat menjadi suatu urgensi yang harus terus diperbaiki dikarenakan penduduk dan luas negara Indonesia yang begitu besar serta sumber daya yang begitu banyak dalam pemanfaatannya sehingga berbagai kendala mengenai pemerataan pembangunan nasional perlu dihadapi secara maksima [6]. Utamanya dapat dilakukan melalui pemulihan perekonomian, politik, dan berfokus pada kesejahteraan serta dapat juga dilakukan melalui perbaikan kualitas fisik berupa sarana prasarana yang menunjang masyarakat dan pembangunan masyarakatnya.

Pembangunan yang dilakukan juga dapat dilalui dalam proses perencanaan dengan mekanisme pelaksanaan di tingkat manapun itu harus dilakukan dengan kerja sama antara pelaku pembangunan dan warga dengan tujuan memperoleh pencapaian yang baik terhadap potensi sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan [4]. Dimulai dari adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dengan adanya proses penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) atau RKP (Rencana Kerja Pemerintah) salah satunya dapat dilalui dengan melakukan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai cara untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang dapat dituangkan dalam pembangunan [3]. Kewenangan yang didapat dengan membuat keputusan tersendiri merupakan prinsip utama dengan adanya semangat swadaya yang telah lama dimiliki oleh desa.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu pondasi yang terus memberikan dampak besar bagi sebuah pembangunan dikarenakan tidak terlepas dari jalannya pembangunan, apalagi pembangunan desa merupakan langkah yang berarti bagi dalam proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah [15]. Serta partisipasi atau peran serta masyarakat menurut dalam pembangunan desa adalah aktualisasi dari keinginan anggota warga desa dalam melibatkan dirinya dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Maka akan sangat tepat bilamana masyarakat dapat berkeinginan penuh dalam melibatkan dirinya dalam memantau perkembangan pembangunan sebagaimana menurut 9 (Rafi'atul Hadawiya dkk, 2021) agar dapat mengetahui hasil diadakannya suatu program [13].

Begitupun dengan Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagai desa yang akan diteliti mengalami proses keterlibatan partisipasi masyarakat bahwa warga Desa Banjarbendo dapat dikatakan belum secara keseluruhan mengalami keterlibatan dalam pembangunan. Hal itu dapat dilihat dari penuturan Kaur Perencanaan bernama Khoirul bahwa kedatangan warga pada pengambilan keputusan khususnya perencanaan pembangunan yang lalu hanya sebagian saja dikarenakan waktu pelaksanaan pada siang hari dan hari kerja yang menyebabkan pengambilan keputusan pembangunan dalam Desa Banjarbendo menjadi kurang maksimal (Hasil Wawancara, 29 Mei 2023). Namun di lapangan juga ditemukan hal yang berbeda dari Kepala Desa Banjarbendo yang mengungkapkan bahwa kehadiran musyawarah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran warga Desa Banjarbendo yang menjadi bukti keikutsertaan pengambilan keputusan dalam partisipasi dapat dibuktikan dengan data terlampir :

Tabel 1. Daftar Hadir Musrenbang Desa Banjarbendo Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah Warga yang Hadir	Jumlah Warga yang Diundang
1.	Perangkat Desa	9	13
2.	Perwakilan RT	11	15
3.	Perwakilan RW	10	15
4.	BPD	5	7
5.	LPMD	3	5

6.	Babinsa	2	5
7.	Warga	6	10
Total		46	70

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Banjarbendo (2023)

Pada tabel 1 ditemui hasil observasi dalam Musrenbang Desa Banjarbendo tahun 2023 yang memiliki daftar hadir dengan jumlah 46 orang dari 70 orang. Dengan adanya jumlah tersebut maka sudah dapat dikatakan mencapai lebih dari 50% jumlah yang diundang seharusnya. Undangan yang hadir diantaranya adalah perangkat Desa, perwakilan RT, perwakilan RW, BPD, LPMD, Babinsa dan warga.

Sekretaris Desa Banjarbendo juga memberikan fakta di lapangan bahwa warga Desa Banjarbendo tidak lagi berkenan dalam memberikan bantuan pada pemberian material maupun bahan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan anggapan bahwa dana desa sudah dapat menghimpun pembangunan yang diputuskan dalam perencanaan (Hasil Wawancara, 05 Mei 2023). Permasalahan tersebut dapat menjadikan Pemerintah Desa dapat dilihat keberhasilan dalam merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan diantaranya :

Tabel 2. Realisasi Pembangunan Desa Banjarbendo Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Presentase Realisasi (%)	Keterangan
1.	Pembuatan tutup saluran RT 02 RW 01	100%	Sudah tercapai
2.	Pendukung jalan & urugan RT 07 RW 04 jalan ke makam mbah soyo	89%	Cukup tercapai
3.	Sidoresik/normalisasi saluran RT 01-RT 04	100%	Sudah tercapai
4.	Pembangunan plesengan selatan gedung serbaguna	100%	Sudah tercapai
5.	Pemavingan depan rumah H. Solli ke selatan RT 08	89%	Cukup tercapai
6.	Pemavingan sebelah ketua RT 08	0%	Belum tercapai
7.	Pembangunan saluran air RT 05	0%	Belum tercapai
8.	Pemavingan batas RT 13 sampai samping rumah Pak Sahi	100%	Sudah tercapai

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Banjarbendo (2023)

Dengan adanya tabel 2 tersebut ditemukan 8 pembangunan yang seharusnya ditargetkan tercapai 100% secara keseluruhan dalam keputusan musyawarah perencanaan pembangunan, namun ditemukan rincian realisasi atau pelaksanaan bahwa terdapat 4 pembangunan yang sudah berhasil dicapai sebesar 100%, kemudian ada 2 pembangunan yang disebut belum tercapai akibat keterbatasan kapasitas SDM Desa, waktu dan dana. Serta terdapat 2 pembangunan yaitu masing-masing cukup tercapai sebesar 89%. Melihat situasi tersebut pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan pada hal – hal yang pokok dan sangat dibutuhkan. Dana Desa seharusnya bisa dikelola dengan baik sehingga tepat guna dan tepat sasaran karena pembangunan fisik memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi pemerintah desa juga harus meningkatkan prioritas pembangunan non fisik yang pada dasarnya pembangunan non fisik juga menunjang perekonomian masyarakat, maka strategi tersebut akan menciptakan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan desa yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa pada prioritas pembangunan maupun hasil dari musyawarah pemerintah desa dan masyarakat [8].

Dari penelitian diatas secara umum, terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat yang dimana dalam penelitian diatas memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian pertama yang ditulis oleh (Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, 2019) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori Sugiyono (2014:8) dengan indikator yang memfokuskan pada pendekatan sample filsafat positivisme, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 78,65% [1].

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh (Akbar & Rachman, 2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi

Rukminto Adi yaitu identifikasi masalah, pengambilan keputusan, upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat. Hasil dari penelitian ini dimana dari pendapat mereka dapat disimpulkan bahwa semangat kolektif kolejial yang didapatkan secara tradisional menjadi satu kekuatan penting dalam proses pembangunan yang semakin positif di desa Masbagik Utara Baru [2].

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh (Rafi'atul Hadawiya dkk 2021) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Cohen dan Uphoff yaitu data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa diketahui tidak maksimalnya kehadiran dari masyarakat desa yang tidak berkenan dikarenakan kurangnya rasa percaya terhadap Pemerintah Desa mengenai proses perencanaan pembangunan, sehingga dalam prosesnya dianggap hanya dilakukan sebatas formalitas, lalu warganya yang sangat sedikit untuk mengupayakan pemberian kritik atau saran untuk kemajuan pembangunan Desa Karang Gadin [13].

Berdasarkan observasi di lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo hingga pada saat ini masih belum dikatakan berjalan dengan maksimal. Permasalahan yang menjadi terhambatnya pelaksanaan musrembang di Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo meliputi : Pertama, Kenyataan yang ditemui di Desa Banjarnendo dimana masyarakat dalam pembangunan dapat dinilai belum efektif. Dengan kata lain partisipasi masyarakatnya masih kurang. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan Desa adalah tanggung jawab Pemerintah desa semata. Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Banjarnendo terlihat pada kegiatan rapat bulanan, dimana terdapat kehadiran masyarakat kurang antusias. Hal ini dapat dilihat dari absen kehadiran rapat (Musrenbang) tingkat desa yang peneliti temukan dilapangan. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat diperoleh bahwa pembangunan belum terlaksana akibat keterbatasan sumber daya manusia, dana dan waktu pelaksanaan, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas akibat kurangnya kesadaran dan tidak adanya dana. Partisipasi dalam evaluasi bahwa masyarakat Desa Banjarnendo selalu menyampaikan evaluasi berupa kritikan. Kemudian hasil yang diperoleh bahwa kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan dana.

Pada penelitian ini yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo" penulis menggunakan fokus pada indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:51), yaitu : pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan dimana keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ketiga, partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pembangunan. Keempat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan [7].

Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat yang kurang maksimal dan realisasi yang tidak menyeluruh ini menjadikan pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi desa maupun kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan hasil pembangunan yang merugikan, melainkan benar-benar dilakukan secara tepat sasaran dengan terus melibatkan masyarakat didalamnya [11]. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat melakukan penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo".

II. METODE

Pada penelitian ini berlokasi di Pemerintah Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena bisa dijadikan salah satu desa sebagai literasi terkait Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjarnendo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dimana agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati dalam penelitian sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Menurut Sugiono (2014:347) bahwa metode kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data dari partisipan. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika sumber data pada penelitian ini terdapat 2 : Pertama data primer, yang

diperoleh dari sumber data langsung atau diamati seperti wawancara, observasi, hingga dokumentasi, Kedua Data Sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur jurnal, hingga media massa. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam penelitian ini informan yang peneliti pilih antara lain : Kepala Desa Banjarnendo, Kasi Pelayanan Desa Banjarnendo, Kaur Perencanaan Desa banjarnendo serta Masyarakat Desa Banjarnendo. Pada teknik Analisis Data oleh Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi : Pertama, Teknik pengumpulan Data adalah teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data adalah proses selektif yang berfokus pada penyerdehanaan abstraksi dan tranformasi data mentah pada penelitian sehingga mendapatkan ringkasan data penting. Ketiga, Penyajian Data adalah semua informasi yang di dapat dilapangan dalam format yang konsisten dan mudah dibaca. Sehingga membuat lebih mudah untuk melakukan kajian secara keseluruhan. Keempat, Penarikan Kesimpulan adalah menyatukan semua data yang diperoleh peneliti di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa data yang diberikan dalam menganalisa bentuk penyajian data beserta hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Adapun analisa penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Banjarnendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011) sebagai berikut :

A. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memutuskan sesuatu yang berkenaan dengan rencana pembangunan [10]. Seperti hadir dalam rapat yang dibentuk BPD atau Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan, memberikan ide dalam rapat tersebut, ikut menginformasikan beberapa hal dalam rapat, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penentuan alternatif yang mengutamakan kepentingan banyak orang utamanya pembangunan yang dibentuk oleh Desa Banjarnendo.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang hadir dalam rapat di Desa Banjarnendo, maka pemerintah Desa Banjarnendo tentu saja melibatkan warganya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarnendo :

“Kami ya khususnya saya sebagai kepala desa menginstruksikan untuk mengundang warga disetiap kegiatan musdes, musrenbang atau bahkan kegiatan kecil yang bila ada ketidaksepakatan yang sudah di APBdes tadi, misal ada pengerjaan pemavingan, maka saya diminta membuat undangan pemantapan yang mana saya mengundang warga yang terdampak pembangunan atau lokasinya dikerjakan, yang diundang pasti RT, RW, Tokoh masyarakat, BPD, LPMD dan kita. Kemudian terkait partisipasi masyarakat baik untuk kegiatan pembangunan ini meskipun kalau ada rapat siang seperti musrenbang memang tidak optimal semua undangan kayak 70 gitu yang datang hanya setengahnya, tetapi insyaallah kita laksanakan kegiatan berbentuk pembangunan ya kita sosialisasikan dulu meski sudah di musdeskan baik dalam RPJM atau RKP.” (Wawancara 06 Juni 2023)

Pernyataan tersebut ikut diungkapkan oleh Bapak Hary Putra W., S.AP selaku Kasi Pelayanan Desa Banjarnendo :
“Desa Banjarnendo itu memang membutuhkan masyarakat ya tentu harus di waktu yang pas, di malam hari pada saat tidak ada kegiatan itu biasanya mereka akan hadir dan di hari Minggu yang berada luar jam kerja. Kendala dalam kehadiran rapat pembangunan ya mau itu RPJM atau RKP khususnya tahun 2023 itu ya memang namanya masyarakat ketika ada sesuatu itu harus dimusyawarahkan ya biasa ada pro-kontra ada suka tidak suka itu biasa, yang jelas kita masih berproses agar masyarakat mau menerima hasil keputusan rapat secara bijak karena tidak semua aspirasi bisa ditampung desa, tetapi paling tidak sudah berupaya mengabulkan usulan masyarakat.” (Wawancara 06 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan utamanya pengambilan keputusan pada kehadiran itu akan berjalan baik dengan syarat bahwa tidak mengganggu aktivitas masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tentu juga ada yang bekerja. Sehingga akan sangat optimal kehadirannya bila dilakukan pada waktu malam hari atau hari libur.

Untuk memberikan sumbangan ide, pasti terdapat langkah secara sistematis agar dapat tersampaikan dan dapat dipertimbangkan Desa untuk dilaksanakan atau tidak, pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara oleh Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarnendo :

“Kita buat format dulu dikirimkan ke RT-RT, lalu data usulan diserahkan ke desa. Nanti dijadikan satu untuk dirapatkan dengan BPD, lalu ada musdes RKP untuk skala prioritas desa. Misalnya dalam usulan itu dana sisa, maka program desa manakah yang bisa dilaksanakan ke RW. Tetapi apabila data usulan ini melebihi badget maka skala prioritas otomatis. Terkadang juga masyarakat waktu pengumpulan usulan itu tidak ada usulan masuk,

tetapi ketika pas musrenbang dan musdes itu tetep bersikeras kalau sudah usul padahal tidak ada usulan. Saya berharap tahun berikutnya bila usulan terlambat masuk, kita tidak bisa toleransi ya.” (Wawancara 06 Juni 2023)

Usulan tersebut dapat disampaikan pada Pemerintah Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Usulan Warga Desa Banjarbendo Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Pembuatan tutup saluran	RT 02 RW 01
2.	Pembuatan pendukung jalan & urugan	RT 07 RW 04 jalan ke makam mbah soyo
3.	Sidoresik/normalisasi saluran	RT 01-RT 0
4.	Pembangunan plesengan	Selatan gedung serbagunan
5.	Pemavingan	Depan rumah H. Solli ke selatan RT 08
6.	Pemavingan	Sebelah ketua RT 0
7.	Pembangunan saluran air	RT 05
8.	Pemavingan	Batas RT 13 sampai samping rumah Pak Sahi
9.	Pembuatan saluran air paralon	Sebelah timur rumah Pak H. Supi
10.	Pembangunan saluran air	RT 11 RW 05

Sumber : Diolah oleh Pemerintah Desa Banjarbendo (2023)

Berdasarkan tabel 1 bahwa terdapat 10 pembangunan dalam pengambilan keputusan yang diusulkan murni dari partisipasi masyarakat Desa Banjarbendo yang berhasil menjadi masukkan bagi pemerintah Desa untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Pemberian usul atau ide juga dapat disampaikan ketika rapat berlangsung baik dalam penentuan pembangunan fisik maupun pembangunan dari sisi sumber daya manusia, hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang didukung oleh Bapak Khoiril Hayat selaku Kaur Perencanaan :

“Ya biasanya kalau mau pengerjaan ada rapat pemantapan dulu ya, nah pas pengajuan itu ada warga misalnya kasih usul mau dibangun apa gitu, lalu saya tampung langsung. Saat sosialisasi kan saya sampaikan bahwa nanti ada pembangunan disini dalam waktu sekian dan nanti saya bilang ke bapak/ibu yang hadir itu punya masukkan apa. Misalnya pemavingan itu kan pengerjaannya ada minusnya juga ya jadi disampaikan juga dalam sosialisasi untuk disepakati apa solusinya. Nah warga bisa usulan dari tulisan, tetapi saya juga bisa mencatat ketika rapat dan saat itu juga dari Sekdes membuat berita acara secara tertulis yang bukan print-printan dan nanti langsung ditandatangani oleh Pak Kades, perwakilan warga, pelaksana dan lainnya.” (Wawancara 6 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan idenya itu sudah dilakukan dengan penjaringan usulan sebelum rapat pembangunan dilakukan, meski terkadang usulan yang diberikan masyarakat sudah terlambat untuk diberikan dan tidak seluruhnya dapat diakomodir. Selain itu, usulan yang diberikan tentunya dapat dimulai dari urutan terbawah yaitu lingkup RT maupun RW yang nantinya disampaikan secara sistematis pada BPD dan Pemerintah Desa untuk dirapatkan dan disepakati dalam bentuk rencana kerja terutama yang bisa menjadi skala prioritas dengan hasil bahwa terdapat 10 kesepakatan usulan yang diterima untuk direncanakan dalam pembangunan.

Pemberian tanggapan dalam pengambilan keputusan di Desa Banjarbendo tentu dapat terjadi, dikarenakan masyarakat Desa Banjarbendo tidak akan langsung menyetujui dan menyetujui apapun bentuk keputusan yang ada dikarenakan pembangunan yang dilakukan adalah bagi kepentingan seluruh masyarakat, apalagi pemberian tanggapan seringkali terjadi ketika Pemerintah Desa Banjarbendo telah melakukan adanya sosialisasi terkait pembangunan secara teknis, dimana Pemerintah Desa akan menerima tanggapan tersebut bila disampaikan sebelum adanya APBDes Banjarbendo agar mudah untuk dipertimbangkan dan diakomodir berupa RKP Desa maupun RPJM Desa berdasarkan adanya skala prioritas.

Penjelasan mengenai sistematika penyampaian tanggapan ketika pengambilan keputusan didukung oleh pernyataan Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarbendo :

“Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa masyarakat pasti akan dimintai unek-unek apa yang mau disampaikan, dan sudah memberitahukan sosialisasi manakah pembangunan yang akan dikerjakan dan teknisnya, lah nanti sekretarisnya menyampaikan bapak ibunya mau unek-uneknya apa. Jadi ya pasti ada aja yang namanya

tanggapan. Tapi kalau usulan atau tanggapan itu diberi setelah APBDes ada dan akhir tahun ya nggak bisa ditampung, jadi mau tidak mau harus menunggu tahun selanjutnya dengan dikaji sesuaikan dengan visi-misi RPJM bahkan warga saking aktifnya tadisampai-sampai yang diminta bisa melebihi dana kita, tetapi tetap prioritaskan mana yang sesuai.” (Wawancara 06 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian tanggapan dalam partisipasi masyarakat ini sudah dilakukan, dimana dalam setiap kegiatan tentu diberlakukan sosialisasi untuk memberitahu sejauh mana pelaksanaan pembangunan akan terjadi, sehingga pada saat itu masyarakat Desa Banjarebendo akan memberikan tanggapan mengenai apa yang ingin disampaikan, apa yang tidak disepakati, bahkan ada pula masyarakat yang tidak tahu bagaimana dan apa yang akan direncanakan.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori partisipasi menurut Cohen & Uphoff (Dwiningrum, 2011) sebagaimana pengambilan keputusan sudah berjalan sesuai atau sudah memberikan perhatian lebih terhadap pemberian ide dalam proses suatu partisipasi. Dimana untuk memutuskan sesuatu yang berkenaan dalam rencana pembangunan yaitu berupa kehadiran dalam rapatnya dan memberikan ide maupun tanggapan dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian maka akan terjalin hubungan yang baik dan kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah sehingga akan mencapai tujuan yang telah diinginkan.

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah keikutsertaan masyarakat yang tidak hanya sekedar dalam perencanaan melainkan dalam lanjutan yang sudah disetujui bersama untuk diimplementasikan [9]. Dimana dalam program dapat menjadi unsur penentu keberhasilan pembangunan Desa Banjarebendo. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat Desa Banjarebendo hendaknya perlu mengetahui rangkaian pelaksanaan pembangunan sebagai langkah bahwa pembangunan yang diputuskan memang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Sebab jika pembangunan tidak melibatkan masyarakat didalamnya, maka dapat mengalami kegagalan dalam mencapai pemerataan kemajuan bagi desa tersebut.

Masyarakat tidak hanya akan menunggu pelaksanaan pembangunan didukung hanya dari pihak Pemerintah Desa atau mitra, tetapi juga akan terlibat untuk menghitung kebutuhan yang nantinya akan dipergunakan serta adanya pelatihan pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan baru pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Khoirul Hayat selaku Kaur Perencanaan Desa Banjarebendo :

“Biasanya terkait pelaksanaan pasti kan ada yang ditunjuk apalagi menghitung kebutuhan terkait sumber daya dana pelaksanaan pembangunan, kayak di pemukiman atau perumahan misalnya minimal ada ahli hitung yaitu 2 fisik dan 1 non fisik, pembangunan lebih banyak karena kita tidak main-main. Begitupun dengan pembangunan sumber daya manusia juga secara rencana sudah diberikan pelatihan apa yang bisa digunakan dan bermanfaat kedepannya misal kartar yang di tahun 2022 itu nggak jalan, tetapi di tahun 2023 ini terdapat pembangunan manusia berupa pelatihan ibu-ibu PKK.” (Wawancara 08 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini bahwa Pemerintah Desa sudah mengupayakan melibatkan masyarakat dari warga desa hingga lembaganya, dimana upaya ini dilakukan agar masyarakat ikut mengetahui adanya pembangunan manakah yang akan difokuskan baik fisik maupun non fisik, berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan, serta komunikasi untuk segera dilakukan pembangunan.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tenaganya untuk pelaksanaan pembangunan tentu terjadi namun tidak terlepas dari seperti apa pembangunan yang akan dilakukan karena kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan peralatan berat yang juga dibutuhkan dalam pembangunan di Desa Banjarebendo menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarebendo :

“Kalau di desanya tidak ada tenaga ahli, dari pendamping desa nya lama tidak segera menggambar, ya saya kasih konsultan untuk gambarnya saja. Untuk tenaga kerja pembangunan desa banyak yang kerja di pabrik, jadi menggunakan pemikiran 50% orang desa boleh bekerja di pembangunan, 50% orang lain itu boleh. Karena belum tentu orang Desa bisa. Akhirannya kerja sama saja, sebetulnya dalam pemerintahan gak boleh. Tapi kalau gak kerja sama ya tidak jalan, contohnya ada yang angkat-angkat, atur lalu lintas. Jadi gak semua warga itu mau ikut tenaga gorong-gorong misalnya. Ini misalnya hitung kedalaman dan lainnya. Ada juga kerja sama dengan Dinas PU dalam hal pengairan gitu, itu kerja samanya tersampaikan di musrenbang Kecamatan.” (Wawancara 08 Juni 2023)

Keinginan untuk menghasilkan pembangunan yang sempurna, maka Desa Banjarebendo menggunakan pihak ketiga untuk membantu kelancaran pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia untuk mengatur dana yang ada demi kemajuan pembangunan, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini didukung juga oleh pernyataan Bapak Khoirul Hayat selaku Kaur Perencanaan Desa Banjarnendo :

“Untuk sumbangan tenaga karena kita dihimbau swakelola ya itu dilihat dulu jenis pekerjaannya, kalau jenisnya kecil kayak pemavingan di gang kecil itu karena kita lihat medannya udah bisa swakelola murni orang-orang kita, tapi kalau u-ditch ya itu gak mungkin murni orang sini semua tapi ada pihak ketiga tetapi tetep ada warganya jadi 4 orang nih misal manual nyangkut, diluar juga diupayakan 50% membantu. Sehingga tidak salah dari segi aturan, tetapi juga dipertimbangkan agar tidak jelek hasil pembangunannya. Tapi kalau medannya mudah ya bisa aja 100% swakelola orang murni desa sendiri yang mengerjakan. Sedangkan pembangunan SDM Desa itu ya kita bisa ajak remaja, para ibu-ibu dan kalangan usia supaya mau ikut pelatihan, tetapi memang itu baru berjalan di tahun 2022. Dimana pada bulan Oktober tahun 2022 itu ada pelatihan kepada ibu-ibu PKK yang dilakukan dengan inisiatif dari ibu PKK Desa Banjarnendo sendiri bersama Pemdes.” (Wawancara 08 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik yakni tenaga dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa mengakui adanya sistem swakelola sebagaimana anjuran pemerintah sehingga usaha untuk dapat menawarkan, melibatkan dan melihat kesediaan masyarakat untuk menjadi sumber daya tenaga dalam pembangunan sudah dilakukan. Namun pengakuan yang menyebutkan adanya penerapan pembangunan dengan keterlibatan pihak lain juga tidak dapat dihindarkan karena adanya medan pembangunan yang beragam, serta adanya data yang tidak selaras bahwa dinyatakan seluruh pembangunan dalam pola swakelola padahal faktanya akan sulit dilakukan karena adanya penggunaan alat berat dengan tenaga luar.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan uang, bahan atau material untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarnendo menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarnendo :

“Kalau bahan, material untuk fisik tidak ada ya. Tapi kalau misalkan ada gorong-gorong terus warga kasih kopi, teh, gorengan, jajan. Contoh warga terdampak pembangunan itu ngasih rokok dan nasi bungkus. Sepengetahuan yang saya lihat dan juga saya misal kasih rokok itu biasa, gitu aja. Jadi lebih ke konsumsi.” (Wawancara 08 Juni 2023)

Pernyataan mengenai sumbangan dana pada pembangunan dengan perlu memerhatikan kegiatan seperti apa yang dilakukan tersebut ikut diungkapkan oleh Bapak Khoirul Hidayat selaku Kaur Perencanaan :

“Lihat kegiatan dulu ya mau itu fisik maupun kegiatan pemberdayaan, ketika kegiatan itu tidak perlu melibatkan masyarakat apalagi sampai penarikan sumbangan dana, material atau bahan itu tidak boleh, tetapi ketika kegiatan itu boleh melibatkan masyarakat dalam sumbangan tersebut ya insyaallah masih tinggi atensinya yaitu masih urun rembuk berupa saran atau material itu masih ada, jadi melihat prokernya seperti apa contohnya proyek murni pemerintah ya gak mungkin kita melibatkan sumbangan masyarakat namun ketika proyek itu masih berbau sosial seperti pemugaran mushola atau pengerjaan renovasi makam itu masih ada perlibatan.” (Wawancara 08 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dana dan bahan atau material pada pembangunan fisik dihasilkan bahwa sebagian besar mengatakan belum ada dimana lebih kepada pemberian sumbangan konsumsi pada pembangunan yang terdampak saja, serta pemberian sumbangan uang hanya dapat terjadi bilamana terdapat kegiatan dengan urgensi yang memang tidak masalah untuk melibatkan masyarakat baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Selain itu terdapat data yang membuktikan bahwa sumber dana sudah tersediaan telah jelas untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam pembangunan sumber daya manusia juga sama dengan hasil bahwa sudah ada dana desa yang diserahkan pada warga Desa Banjarnendo untuk dikelola dan dimanfaatkan.

Dari fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori partisipasi menurut Cohen & Uphoff (Dwiningrum, 2011) sebagaimana dalam pelaksanaan belum maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan itu sendiri merupakan keikutsertaan masyarakat yang tidak hanya sekedar dalam perencanaan melainkan dalam lanjutan yang sudah disetujui bersama untuk diimplementasikan, alasannya pada segi keterlibatan warga yang kurang dalam menyumbang pemberian bahan maupun material dan finansial yang kurang dalam pembangunan. Dengan kendala kurangnya dana serta kurangnya keterlibatan masyarakat, sebuah program tidak dapat berjalan secara efisien. Jika salah satu dari sumber daya manusia atau finansial tidak berjalan efektif maka keberlangsungan program atau kebijakan akan berjalan lambat dan seadanya atau tidak sesuai visi misi.

C. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah sejauh mana pembangunan dapat memberikan manfaat yang membantu berbagai pihak dalam pembangunan dimana tidak dapat terpisahkan dari adanya hasil pembangunan seperti peningkatan persentase keberhasilan pembangunan dan kesesuaian terhadap target yang diinginkan di Desa Banjarnendo.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan di Desa Banjarebendo menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarebendo :

“Contohnya kalau pembangunan fisik ya dengan pembangunan saluran air itu yang dibangun pada tahun 2023 itu bermanfaat bahwa aliran air lancar, jadi tidak banjir. Terus kalau jalan paving sudah enak. Jadi bisa dibilang banyak manfaatnya. Tetapi kalau pembangunan secara eksplisit sudah optimal dan tidak ada tidak optimal.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Permasalahan desa mengenai banjir dapat sedikit teratasi dengan adanya pembangunan fisik sebagaimana pernyataan dengan hasil wawancara oleh Bapak Hary Putra W. S.AP selaku Kasi Pelayanan Desa Banjarebendo :

“Saat ini saja misalnya dalam pembangunan saluran air, jadi untuk menanggulangi banjir yakni dengan gorong-gorong dan normalisasi saluran air itu ya meskipun masih banjir pun tetapi lebih cepat surut. Tetapi kalau bicara pembangunan non fisik yang mungkin saat ini belum berkembang apalagi di tahun 2020 kan ada pandemi ya memang kegiatan semacam itu yang dilaksanakan secara offline sulit dilaksanakan karena bisa terjadi kerumunan.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Peran Pemerintah Desa dan mitra sudah berjalan dengan baik, sebagaimana pernyataan selanjutnya diberikan oleh Bapak Syukur selaku Tokoh Masyarakat Desa Banjarebendo :

“Alhamdulillah kalau manfaat saya rasa sudah ada, memang kita kan skala prioritas nah usulan pembangunan yang saya sampaikan ke Desa pasti untuk kebersamaan ya kayak saluran, jalan dan paving itu sangat bermanfaat. Nah kalau bicara bangunan dibangun tapi tidak ada manfaat itu nggak ada sih, karena BPD, LPMD, Pmdes turun dan sudah mengkaji dan melihat yang real di lapangan. Sehingga nggak ada yang terbengkalai.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam merasakan keberuntungan atau keberhasilan dari adanya pembangunan ini memang ada, bahwa sudah banyak yang diperbaiki oleh Desa utamanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan pavingisasi meskipun terdapat beberapa realisasi yang belum tercapai pada data yang dilampirkan.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat atas fasilitas yang dibangun di Desa Banjarebendo dikatakan tidak membaik utamanya pemeliharaan pembangunan, hal ini sesuai pada wawancara menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarebendo :

“Kalau bicara mengenai pemeliharaan fisik sebagai partisipasi pemanfaatan itu beda-beda, kayak yang saya sampaikan tadi kalau ada masyarakat itu yang mau memanfaatkan hasil tapi ada juga yang cuek meskipun lebih banyak yang peduli. Kalau bicara pembangunan non fisik itu baru ada di tahun 2023.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Pernyataan mengenai pemeliharaan atau penggunaan fasilitas pembangunan fisik yang tidak dilakukan dengan baik oleh masyarakat Desa Banjarebendo juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Hary Putra W. S.AP selaku Kasi Pelayanan Desa Banjarebendo :

“Ya memang kalau dari pemeliharaan itu kalau selesai pekerjaan maka kita adakan serah terima dari pihak pemerintah Desa yang nanti ada poin-poin yang kita terapkan disitu termasuk pemanfaatan dan dijaga dengan sebaik-baiknya, namun di lapangan memang ada warga ya istilahnya kurang peduli misalnya pada pembangunan saluran air itu masih tetep aja ada yang buang sampah sembarangan meskipun sudah dibersihkan.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas yang dibangun pada pembangunan fisik senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Khoirul Hidayat selaku Kaur Perencanaan Desa Banjarebendo :

“Memang memelihara, merawat dan melestarikan itu lebih sulit daripada membuat dan membangun atau mendirikan. Nah itu yang perlu diwacanakan untuk terus didengarkan di masyarakat dan perlu diakui itu masih rendah tingkat partisipasinya, karena butuh anggaran dan dana dan karena mungkin dalam setiap program tidak dibarengi dengan masalah pemeliharaan dan perawatan ya mungkin akhirnya berat kalau cuma mengandalkan masyarakat, apalagi benturan dengan masalah SPJ atau penggunaan alokasi dana yang membuat sulit untuk mau melaksanakan upaya perawatan itu, itu sih yang saya cermati.” (Wawancara 12 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas yang dibangun pada pembangunan fisik dikatakan masih sangat rendah, hal ini dikarenakan pada wilayah lingkungan baik RT, RW tidak memiliki dana yang cukup untuk merawat atau memperbaiki bilamana terjadi kerusakan serta masih ada warga yang kurang sadar akan kebersihan. Sedangkan pada pembangunan sumber daya manusia yang tidak berjalan di tahun 2022 menyebabkan adanya hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam keterlibatan juga dapat dikatakan tidak dapat berlangsung meski baru berjalan pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2023.

Dari pernyataan diatas bahwa fenomena tersebut jika dikaitkan dengan teori partisipasi menurut Cohen & Uphoff (Dwiningrum, 2011) bahwa pengambilan manfaat dilapangan belum maksimal, karena pengambilan manfaat sendiri berarti sejauh mana pembangunan dapat memberikan manfaat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perawatan penggunaan manfaat. Karena hal nya dalam partisipasi dalam pengambilan manfaat yang mana partisipasi ini tidak terlepas dari adanya kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai dan upaya masyarakat dalam melakukan penggunaan dan perawatan pada pembangunan di Desa [5]. Maka dari hal itu tidak hanya masyarakat desa saja tetapi pemerintah desa juga serta merta ikut merawat dan menjaga terkait manfaat dalam setiap pembangunan yang dilakukan agar terjaga hingga jangka waktu yang panjang.

D. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam memperoleh hasil pelaksanaan yang dapat diawasi dan dinilai oleh masyarakat dari perencanaan sampai pada pelaksanaan [14]. Keikutsertaan masyarakat bisa dalam bentuk kritikan terhadap proses dilakukannya pembangunan, memberikan nasihat dan menilai untuk dapat diberikan kepada aparatur desa sebagai materi yang dapat dievaluasi dimana ini menjadi cara masyarakat dalam mengawasi pembangunan [9]

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program di Desa Banjarnendo sangat tinggi bahkan ada masyarakat yang membuat suasana pembangunan menjadi tidak terkondisikan dengan berita hoax, dimana ini disampaikan menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarnendo :

“Kalau kritikan biasanya diberikan masyarakat dalam mengevaluasi, ya bisa dari whatsapp ke Pak Modin sebagai Kasi Kesejahteraan masyarakat yang menaungi pembangunan utamanya fisiknya ya, bahkan sebelumnya ada warga itu bikin berita hoax yang mengadu domba kalau proyek pembangunan tidak kunjung dikerjakan, padahal sudah dipasang pipa dengan menjelekan pemdes karena salah satu oknum yang ingin menghancurkan kita, oknumnya itu langsung ke kecamatan tanpa kritik dulu ke desa bahkan ke RT-RW, bahwasanya warga nggak terdampak tapi kok membuat alibi.” (Wawancara 14 Juni 2023)

Kritik sebagai bentuk evaluasi disepakati adalah hal yang wajar terjadi, namun terdapat permasalahan sebagaimana yang sudah banyak diungkapkan oleh informan lainnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Khoirul Hidayat selaku Kaur Perencanaan Desa Banjarnendo :

“Kritik, saran dan keluhan adalah sebagian dari kemajuan untuk bisa tahu gimana sih berjalannya pelaksanaan dengan rencana itu tadi, sepanjang kritik dan saran memiliki sifat yang membangun insyaallah bisa diselesaikan, tetapi yang jadi masalah itu ada komplain yang sifatnya justru menjadikan suasana tidak kondusif yang membutuhkan waktu dan energi untuk menyelesaikan walaupun sampai hari ini memang ada beberapa yang ditindaklanjuti secara kondusif dan baik.” (Wawancara 14 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberi kritikan terkait sejauh mana pelaksanaan program dengan rencana di Desa Banjarnendo sangat tinggi dengan adanya pelaporan masyarakat melalui whatsapp atau datang langsung ke Desa bahkan sampai pemanggilan wartawan untuk meliput pembangunan yang menjadi permasalahan dengan tidak membicarakan secara internal atau mengutamakan desa terlebih dahulu dimana pelaporan juga ada yang langsung pada tingkat Kecamatan.

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan program utamanya mengawasi pembangunan di Desa Banjarnendo menurut Bapak Sugeng Bahagia, S.H selaku Kepala Desa Banjarnendo :

“Untuk pengawasan iya tentu, karena masyarakat melalui RT-RW terus rapat di sambut dalam RKP des atau RPJM des itu dimana skala prioritasnya dari RT RW, tetapi saya lihat di lapangan misal bangunan kayak paving rusak tapi nggak pernah diperbaiki atau bantu gitu, jadi pemerintah sebagai controlling gimana di lapangan yang akhirnya bisa di PAK karena tidak tertuang di APBDes.” (Wawancara 14 Juni 2023)

Pengawasan pembangunan fisik maupun sumber daya manusia juga dilakukan bukan hanya warga desa tetapi anggota dari BPD sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Bapak Khoirul Hidayat selaku Kaur Perencanaan Desa Banjarnendo :

“Tadi seperti yang saya bilang mengenai pengawasan kalau secara struktural masyarakat sudah ada, terus dari BPD itu ada dapil sendiri sendiri per RW untuk ikut mengontrol di Lapangan sehingga masyarakat jalan mengawasi, kitanya juga jalan. Dengan adanya hal ini, membuat saya tidak kehilangan informasi.” (Wawancara 14 Juni 2023)

Pernyataan berbeda mengenai pengawasan diungkapkan oleh Bapak Hary Putra W. S.AP selaku Kasi Pelayanan Desa Banjarnendo :

“Masalah pengawasan sebenarnya sudah ada dalam kepanitiaan itu ada pelaksana, pengawas, perencana, serah terima itu ada aturannya. Dan dari yang saya cermati sih sudah jalan tetapi kalau ada pengawasan dari pihak

lain sepanjang dia memang kompeten dan punya otoritas mengawasi ya tidak masalah, tapi kalau dari masyarakat umum itu bagi saya bukan pengawasan melainkan sifatnya dia hanya menyampaikan keluhan dan hal yang mungkin tidak sesuai.” (Wawancara 14 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik sudah dilakukan, dimana masyarakat berusaha melihat kesesuaian dari apa yang disampaikan dalam sosialisasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan terjadi dengan faktanya nanti dilapangan meskipun tim pengawas dalam pembangunan sudah ditunjuk, namun penerima manfaat pembangunan Desa Banjarbendo pasti diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Desa Banjarbendo.

Fenomena dari pernyataan mengenai kritikan dan saran diatas jika dikaitkan dengan teori Cohen & Uphoff (Dwiningrum, 2011) dimana proses evaluasi sudah dilaksanakan dengan maksimal dan masyarakat juga sering memberikan penilaian berupa menyampaikan kritikan dan saran mengenai pembangunan desa yang sudah dilaksanakan kepada pemerintah hanya saja masyarakat seringkali mengkritik sangat emosional dan gegabah. Dengan demikian, peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi karena apabila pembangunan tidak mendapatkan evaluasi dari masyarakat, maka pemerintah tidak akan mampu memperbaiki kesalahan maupun kekurangan pembangunan yang dibuat agar mencapai tujuan yang akan dicapai.

IV. SIMPULAN

Dari adanya pembahasan dan uraian di atas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.** Dalam rapat pembangunan yang dilakukan di desa Banjarbendo pada siang hari tahun 2023, maka sebagaimana dalam Musrenbang Tahun 2023 hanya hadir 46 orang dari 70 undangan meski informan menyebut bahwa sudah lengkap. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini sudah sesuai dan sudah dilaksanakan dengan teori partisipasi Cohen & Uphoff. Dengan kehadiran RT, RW, LPMD, BPD, Tokoh dan Pemerintah Desa. Kemudian masyarakat Desa Banjarbendo sudah berupaya untuk memberikan aspirasi mengenai apa yang disepakatimaupun tidak di sepakati meskipun terkadang terjadi keterlambatan dan ada ide yang belum terakomodir karena skala prioritas walaupun terdapat fakta dimana sudah terdapat pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat sebanyak 10 jenis pembangunan, serta masyarakat sudah aktif dalam memberikan tanggapan disetiap pengambilan keputusan terjadi.
2. **Partisipasi dalam Pelaksanaan.** Masyarakat Desa Banjarbendo selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dimana Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan menunjuk pelaksana pembangunan, partisipasi masyarakat desa banjarbendo tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal atau masih kurang efektif terkait apa yang akan dilaksanakan meskipun vakumnya struktural seperti Karang Taruna dan sulitnya melakukan pertemuan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff. Kemudian partisipasi masyarakat Desa Banjarbendo dalam pemberian sumbangan tenaga pembangunan fisik direncanakan dengan sistem swakelola (dikerjakan sepenuhnya dengan tenaga warga Desa Banjarbendo) yang diberlakukan akibat medan pembangunan yang tidak keseluruhan bisa dikerjakan manual. Serta sumbangan uang, bahan maupun material yang mana masyarakat belum berkontribusi dan lebih kepada pemberian konsumsi bagi pembangunan terdampak.
3. **Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat.** Masyarakat Desa Banjarbendo telah menerima manfaat/keberhasilan dalam pembangunan dengan arah tujuan serta cita-cita pembangunan yang dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan dari sisi output. dimana terdapat 4 pembangunan tercapai sebesar 100% dari 8 pembangunan yang ada, lalu 2 pembangunan yang belum terlaksana diakibatkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dana dan waktu pelaksanaan. Manfaat yang besar dirasakan terlihat dari mega pembangunan perbaikan jalan. Serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas pembangunan fisik yang dibangun meski telah diserahterimakan akibat keterbatasan dana masyarakat yang lebih bergantung pada dana Pemerintah Desa dan kurangnya kesadaran akan kebersihan.
4. **Partisipasi dalam Evaluasi.** Masyarakat Desa Banjarbendo dalam memberikan evaluasi yakni berupa kritikan yang seringkali sudah disampaikan secara lisan, datang ke desa langsung dan ada yang menghubungi lewat whatsapp pada Kasi Pelayanan Masyarakat dan pada lembaga mitra Desa (BPD dan LPMD) dimana paling parahnya masyarakat bahkan ada yang langsung melaporkan pada tingkat Kecamatan dalam pembangunan akan dilangsungkan. Selain itu, evaluasi juga diberikan masyarakat melalui pengawasan yang dinilai luar biasa dengan melihat kesesuaian dalam sosialisasi sebelum pembangunan dan saat pembangunan berlangsung meskipun sudah ada tim pengawas yang ditunjuk untuk meninjau sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan desa.

REFERENSI

- [1] Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, M. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten SidenrengRappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- [2] Akbar, M. U., & Rachman, M. T. (2021). *UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 pembangunan tersebut . Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indo*. 9(2), 1– 11.
- [3] Basri, H., Budi, H., Teniro, A., AB, S., Efendi, M., & Surya, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 25–32.
- [4] Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- [5] Fitri Herdayani, S. (2021). Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, 23–31. <http://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/wp/article/view/354%0Ahttp://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/wp/article/download/354/271>
- [6] Gustiman, Y. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan. *Juhanperak*, 2(3), 913– 934.
- [7] Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i1.180>
- [8] Hidayat Asep, Yani Fresh Zira Selga, & Rahmi Aliviannisy Yoiko. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091–7100.
- [9] Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan (Madani)*. 12(3), 196–212.
- [10] Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153>
- [11] M. Wahyuddin, d k k . (2020). Phinisi Integration Review Keefektifan. *Phinisi Integration Review*, 3(1), 90– 99.
- [12] Nugroho, I., Dahuri, R., Sumodiningrat, G., & Lembaga Penelitian, P. dan P. E. dan S. (2012). Pembangunan wilayah : perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. In *TA - TT - (Ed. rev.,)*. LP3ESJakarta. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/812615314>
- [13] Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200.
- [14] Sabardila, A., Setiawaty, R., & Markhamah, M. (2020). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto Melalui Program Sosialisasi. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.556>
- [15] Syaputri, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Puuwonua. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.472>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.